



Dinas
pmd
KABUPATEN LAMONGAN

Desa
Berjaya

Lamongan
Megilan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Laporan Pengelolaan Risiko

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan**

Tribulan III – Tahun 2025



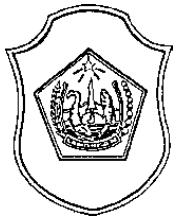
dpmo.lamongan



lamongankab.go.id/dinpmo



Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprapto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpmdu@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 17 Oktober 2025

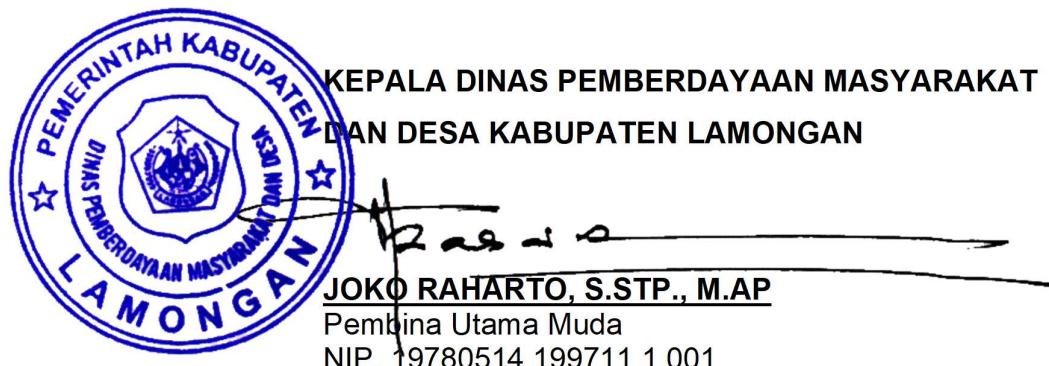
Nomor : 400.10/ 725.1 /413.108/2025
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
TRIBULAN III Tahun 2025 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan

Kepada :

Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

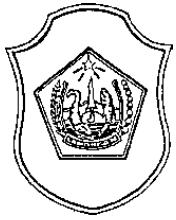
Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
III Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprapto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpm@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 400.10/ 725.1 /413.108/2025

TANGGAL TERBIT : 17 Oktober 2025

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Disiapkan Oleh | : | Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan SIWANTA WICAKSONO, SE NIP. - |
| Diperiksa | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan ERWIN MAHBUB JUNIDI, SE NIP. 19790408 201001 1 007 |
| Disahkan Oleh | | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP NIP. 19780514 199711 1 001 |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSLUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;

- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Triwulan III sebagaimana terlampir:
(lampiran form 9 dari simario berikut ini)

| Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------|---|--|--|
| No | Entitas | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
| Risiko Strategis OPD | | | | | | | |
| 1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa | ROO.25.13.21.01 | 13 | DPMD - Bidang Pemerintahan Desa | Batas Wilayah Desa Tidak Diketahui dengan jelas | Wilayah Desa Tidak Tertata |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Penggunaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai | ROO.25.13.21.02 | 10 | DPMD - Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa | Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa | BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat |
| 3 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa | ROO.25.13.21.03 | 12 | DPMD - Bidang Pemerintahan Desa | SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi | Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Aset desa yang belum terinventarisir | ROO.25.13.21.04 | 12 | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset & Sumber Daya Desa | Data mengenai aset desa tidak ada | Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan |
| 5 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | APBDesa tidak tepat waktu | ROO.25.13.21.05 | 11 | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset & Sumber Daya Desa | Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa | 1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Silpat Kades dan Perangkat tidak bisa dicairkan |
| 6 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga | ROO.25.13.21.06 | 11 | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen | Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi terhambat |
| 7 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa | ROO.25.13.21.07 | 10 | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan | Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan |
| Risiko Operasional OPD | | | | | | | |
| 1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa | ROO.25.13.21.01 | 11 | DPMD | Batas Wilayah Desa Tidak Diketahui dengan jelas | Wilayah Desa Tidak Tertata |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Penggunaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai | ROO.25.13.21.02 | 11 | DPMD | Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa | BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat |
| 3 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa | ROO.25.13.21.03 | 10 | DPMD | SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi | Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Aset desa yang belum terinventarisir | ROO.25.13.21.04 | 11 | DPMD | Data mengenai aset desa tidak ada | Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan |
| 5 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | APBDesa tidak tepat waktu | ROO.25.13.21.05 | 9 | DPMD | Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa | 1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Silpat Kades dan Perangkat tidak bisa dicairkan |
| 6 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga | ROO.25.13.21.06 | 8 | DPMD | Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen | Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi terhambat |
| 7 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa | ROO.25.13.21.07 | 8 | DPMD | Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan | Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan |

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi sekretaris desa dan kepala desa dan yang belum dilaksanakan adalah bimtek atau pelatihan bagi Operator Desa atau Tenaga IT Desa.

(lampiran, form 10 dari simario)

Penilaian Kegiatan (RTP CEE)

Simpulan

[Dinas Terkait](#) / [Pemerintah Kabupaten Lamongan](#) / [Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa](#) / [Penilaian Kegiatan \(RTP CEE\)](#) / Review

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

| No | Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai | Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian | Penanggung jawab | Target Waktu Pnyelesaian |
|----|--|--|------------------------------|--------------------------|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | Untuk meningkatkan lagi pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024, mereviu kembali pohon kinerja atas sasaran strategis meningkatnya manajemen internal Dinas PMD dengan indikator nilai SAKIP, indikator tsb berisian, meningkatkan kinerja pada tahun 2025 untuk merealisasikan sesuai dengan target yang direncanakan | Sesuai dengan Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai terkait Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2024, maka Rencana Tindak Perbaikan dalam Lingkungan Pengendalian (Dinas PMD Kabupaten Lamongan) akan mereviu kembali pohon kinerja atas sasaran strategis, serta meningkatkan kinerja pada tahun 2025 realisasi sesuai dengan target yang direncanakan | Dinas PMD Kabupaten Lamongan | Januari - Desember |
| 8 | - | - | - | - |

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

Formulir Kertas Kerja
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Nama Pemda | Pemerintah Kabupaten Lamongan |
| Tahun Penilaian | 2025 |
| Tujuan Strategis Pemda | |
| Urusan Pemerintahan | Pemberdayaan masyarakat dan desa |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada * | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|----|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|----|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|

Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1 Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa | ROO.25.13.21.01 | Sosialisasi Batas Desa | - | Sosialisasi Batas Desa | DPMD - Bidang Pemerintahan Desa | Januari - Desember |
| 2 Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai | ROO.25.13.21.02 | Pelatihan Admin BUMDesa | - | Pelatihan Admin BUMDesa | DPMD - Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa | Januari - Desember |
| 3 Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa | ROO.25.13.21.03 | Bimtek Kapasitas Operator Desa | - | Bimtek Kapasitas Operator Desa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 4 Aset desa yang belum terinventarisir | ROO.25.13.21.04 | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | - | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 5 APBDesa tidak tepat waktu | ROO.25.13.21.05 | Monev ABDesa | - | Monev ABDesa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 6 Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga | ROO.25.13.21.06 | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | - | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Januari - Desember |
| 7 Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa | ROO.25.13.21.07 | Pelatihan Administrasi PKK | - | Pelatihan Administrasi PKK | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Januari - Desember |

Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|---|---|--------------------|
| 1 Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa | ROO.25.13.21.01 | Melengkapi Tanda Batas Desa | - | Melengkapi Tanda Batas Desa | DPMD - Bidang Pemerintahan Desa | Januari - Desember |
| 2 Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai | ROO.25.13.21.02 | Memahami Pengelolaan BUMDesa | - | Memahami Pengelolaan BUMDesa | DPMD - Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa | Januari - Desember |
| 3 Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa | ROO.25.13.21.03 | Perekruit Perangkat Desa/ Operator Desa | - | Perekruit Perangkat Desa/ Operator Desa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 4 Aset desa yang belum terinventarisir | ROO.25.13.21.04 | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | - | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 5 APBDesa tidak tepat waktu | ROO.25.13.21.05 | Monev ABDesa | - | Monev ABDesa | DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa | Januari - Desember |
| 6 Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga | ROO.25.13.21.06 | Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa | - | Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Januari - Desember |
| 7 Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa | ROO.25.13.21.07 | Pelatihan Administrasi PKK | - | Pelatihan Administrasi PKK | DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Januari - Desember |

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

Formulir Kertas Kerja
Pengomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Nama Pemda | Pemerintah Kabupaten Lamongan |
| Tahun Penilaian | 2025 |
| Tujuan Strategis Pemda | |
| Urusan Pemerintahan | Pemberdayaan masyarakat dan desa |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasi | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|----|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
|----|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|

Risiko Strategi OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

| | | | | | | |
|---|-------------|------|---|--------------------|--------------------|---|
| 1 Sosialisasi Batas Desa | Sosialisasi | DPMD | Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 2 Pelatihan Admin BUMDesa | Bimtek | DPMD | Direktur dan Anggota BUMDesa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 3 Bimtek Kapasitas Operator Desa | Bimtek | DPMD | Operator Desa/ Sekdes | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 4 Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | Pelatihan | DPMD | LPM/BPD/Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 5 Monev ABDesa | Monev | DPMD | Perangkat Desa, BendaHara Desa, Sekdes, Kades | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 6 Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | Pelatihan | DPMD | Lembaga Desa, PKK | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 7 Pelatihan Administrasi PKK | Pelatihan | DPMD | Lembaga Desa, PKK | Januari - Desember | Januari - Desember | - |

Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 1 Melengkapi Tanda Batas Desa | Penegasan Batas Desa | Pemerintah Desa | Masyarakat Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 2 Memahami Pengelolaan BUMDesa | Kelola BUMDesa | BUMDesa | BUMDesa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 3 Perekruit Perangkat Desa/ Operator Desa | Pengangkatan Perangkat Desa/ Operator Desa | Pemerintah Desa | Operator/ Perangkat Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 4 Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | Pengetahuan Lembaga Desa | Pemerintah Desa | BPD/ LPM/ Lembaga Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 5 Monev ABDesa | Monev APBDesa | Pemerintah Desa | Pemerintah Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 6 Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa | Pengetahuan Lembaga Desa | Pemerintah Desa | BPD/ LPM/ Lembaga Desa | Januari - Desember | Januari - Desember | - |
| 7 Pelatihan Administrasi PKK | Pengetahuan Administrasi PKK | Pemerintah Desa | Lembaga Desa/ PKK | Januari - Desember | Januari - Desember | - |

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat simpulan bahwa Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan *time management* atau pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat diraih.

